

Desa Wisata sebagai Ruang Keseimbangan: Strategi Pembangunan Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya

Muhammad Rahmad¹, Rashika Sekar Wibowo²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

¹ muhammadrahmad@iptrisantia.ac.id ; ² rashika.wibowo@student.stptrisantia.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan global yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, perkembangan pesat pariwisata juga menimbulkan tantangan serius terkait pelestarian warisan budaya yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi. Artikel ini menganalisis bagaimana desa wisata dapat menjadi model pengembangan pariwisata yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan konservasi budaya. Melalui kajian literatur sistematis dan analisis kasus komparatif dari Thailand, Laos, Eropa, Arab Saudi, dan Indonesia, ditemukan bahwa keseimbangan tersebut hanya dapat dicapai melalui strategi pengelolaan berbasis keberlanjutan, partisipasi komunitas, serta regulasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi (Sangchumngong & Kozak, 2020; Dodds, 2025; Zhu et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa desa wisata berpotensi menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pelaku industri untuk menciptakan pariwisata yang inklusif sekaligus menjaga identitas budaya (Bratayasa, 2023; Diarta & Ketut, 2017). Di sisi lain, kurangnya tata kelola dan pengawasan dapat berujung pada komersialisasi berlebihan, hilangnya otentisitas budaya, serta degradasi lingkungan (Wasela, 2023). Dengan demikian, pendekatan holistik dan multidimensi dalam pengelolaan desa wisata menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan budaya, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Kata Kunci: *pengembangan pariwisata; warisan budaya; desa wisata; pariwisata berkelanjutan; pariwisata berbasis komunitas; pembangunan berimbang*

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian global maupun lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini berkembang pesat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, kemudahan akses transportasi, serta dorongan gaya hidup yang menempatkan perjalanan sebagai bagian dari kebutuhan. Bagi banyak negara berkembang, pariwisata menjadi salah satu instrumen utama dalam memperoleh devisa, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat identitas budaya di kancah internasional. Namun, perkembangan pesat tersebut tidak lepas dari dilema besar: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan ekonomi melalui pariwisata dengan tanggung jawab menjaga kelestarian budaya lokal?

Dalam konteks pembangunan pariwisata, konsep desa wisata menjadi salah satu pendekatan yang dianggap mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut. Desa wisata bukan hanya menghadirkan atraksi berbasis keindahan alam, tetapi juga mengangkat identitas sosial dan

budaya masyarakat lokal. Kehadiran desa wisata sering kali dikaitkan dengan potensi pelestarian warisan budaya, baik dalam bentuk warisan *tangible* (seperti arsitektur tradisional, candi, pura, rumah adat, maupun artefak) maupun *intangible* (seperti tarian, musik, bahasa, kearifan lokal, dan ritual keagamaan) (Wasela, 2023). Melalui pariwisata, identitas tersebut dapat dikenal lebih luas sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pariwisata juga dapat membawa risiko serius bagi warisan budaya. Ketika desa wisata dikelola secara komersial tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, terdapat potensi terjadinya eksploitasi budaya, komodifikasi tradisi, serta hilangnya makna otentik dari praktik budaya tersebut (Pistol & Ronda, n.d.). Fenomena "disneyfikasi" budaya—di mana tradisi lokal diubah semata-mata demi memenuhi ekspektasi wisatawan—menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan nilai-nilai kultural. Selain itu, tekanan pembangunan infrastruktur, meningkatnya jumlah wisatawan, dan perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat desa wisata juga berpotensi mengganggu harmoni lokal (Stecker & Hartmann, 2019).

Dalam literatur pariwisata, isu keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya telah banyak dibahas. Sangchumng (2016) dan Sangchumng dan Kozak (2020) menekankan pentingnya model keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya di Thailand. Khlaikaew (2015) menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan terkait bagaimana warisan budaya sebaiknya dikelola di kawasan warisan dunia. Dai dan Zhang (2024) mengeksplorasi strategi *win-win* antara konservasi warisan dan industri pariwisata, sementara Dodds (2025) membuktikan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan selama 15 tahun di Tofino, Kanada, tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dalam menjaga harmoni antara ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dari beragam kajian ini dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya tidak bisa dicapai dengan pendekatan tunggal, melainkan membutuhkan kolaborasi, regulasi, serta kesadaran kolektif.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia menghadapi tantangan yang serupa. Desa wisata berkembang pesat di berbagai daerah, seperti Desa Penglipuran di Bali, Desa Sade di Lombok, hingga kawasan Borobudur di Jawa Tengah. Pemerintah mendorong desa wisata sebagai motor pembangunan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat *branding* pariwisata nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak desa wisata yang masih menghadapi persoalan klasik: kurangnya tata kelola, ketimpangan distribusi manfaat, hingga ancaman hilangnya nilai budaya akibat pariwisata massal (Diarta & Ketut, 2017). Waluyo dan Guritno (2023) juga menegaskan bahwa harmonisasi antara ekowisata, warisan budaya, dan keanekaragaman hayati di Indonesia memerlukan koordinasi kebijakan yang jauh lebih terintegrasi.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, isu ini berkaitan erat dengan konsep *sustainable tourism development*, di mana pariwisata harus memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Pariwisata yang terlalu menekankan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan pilar lain berisiko menciptakan ketimpangan sosial serta kerusakan budaya maupun alam (Sauf, 2015). Sebaliknya, pelestarian budaya tanpa memperhatikan aspek ekonomi juga dapat menimbulkan keterbatasan bagi masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan merupakan kata kunci yang harus menjadi dasar dalam setiap perencanaan dan pengelolaan desa wisata (Yang et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi, tantangan, dan peluang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya di desa wisata. Melalui kajian literatur dan analisis kasus internasional maupun nasional, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik dalam mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan atau keuntungan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana desa tersebut mampu menjaga otentisitas budaya dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kerangka Konseptual Pariwisata Berkelanjutan dan Warisan Budaya

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkan dalam laporan *Our Common Future* oleh Komisi Brundtland pada 1987. Sauf (2015) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya secara simultan, memastikan bahwa manfaat yang diperoleh generasi saat ini tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang. Dalam konteks warisan budaya, keberlanjutan berarti bahwa daya tarik budaya yang menjadi fondasi suatu destinasi harus dapat dipertahankan keaslian dan integritasnya meskipun mengalami tekanan dari aktivitas pariwisata.

Dai dan Zhang (2024) dalam kajian komprehensif tentang warisan budaya dan pengembangan pariwisata mengidentifikasi empat strategi utama untuk mencapai skenario *win-win* antara konservasi warisan dan industri pariwisata: perencanaan terintegrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, penetapan kapasitas daya dukung yang berbasis sains, pengembangan produk wisata yang mengedepankan interpretasi autentik, dan mekanisme distribusi pendapatan yang berkeadilan. Ramazanova et al. (2024) melengkapi kerangka ini dengan menekankan perspektif wisatawan dalam pengelolaan warisan berkelanjutan di Porto, Portugal: wisatawan yang memahami nilai warisan cenderung lebih bertanggung jawab dalam berperilaku dan lebih menghargai pengalaman autentik dibandingkan wisatawan yang diperlakukan semata sebagai konsumen hiburan.

2.2 Community-Based Tourism sebagai Instrumen Keseimbangan

Community-based tourism (CBT) telah berkembang menjadi paradigma pengelolaan pariwisata yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar objek atau penerima manfaat pasif. Sangchumng dan Kozak (2020) membuktikan bahwa model CBT yang diterapkan di desa Ban Wangka, Thailand, berhasil mengintegrasikan tujuan ekonomi, konservasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka yang koheren. Kunci keberhasilannya terletak pada pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, sehingga keputusan tentang apa yang dapat "dijual" kepada wisatawan dan apa yang harus dilindungi dari komersialisasi tetap berada di tangan komunitas itu sendiri.

Bratayasa (2023) dalam studi kasus Desa Suranadi, Bali, menambahkan dimensi penting tentang peran regulasi lokal adat dalam mendukung CBT: norma-norma adat yang masih kuat di komunitas tersebut berfungsi sebagai "konstitusi informal" yang melindungi aspek-aspek sakral budaya dari tekanan komersialisasi. Wasela (2023) memperluas perspektif ini dengan

menekankan bahwa warisan budaya takbenda—yang mencakup tari, musik, ritual, dan tradisi lisan—memerlukan mekanisme perlindungan yang berbeda dari warisan budaya benda, karena kerentanannya terhadap komodifikasi yang mengubah makna dan fungsi sosial-spiritualnya.

2.3 *Balanced Development Index* sebagai Kerangka Evaluatif

Zhu et al. (2022) mengembangkan *Balanced Development Index* (BDI) sebagai instrumen evaluasi multidimensi yang mengukur keberlanjutan desa tradisional di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. BDI mencakup empat dimensi pengukuran yang dibobot secara proporsional: dimensi ekonomi (pendapatan, kesempatan kerja, infrastruktur), dimensi sosial (kohesi komunitas, kualitas layanan publik, partisipasi), dimensi budaya (konservasi warisan, vitalitas tradisi, identitas), dan dimensi ekologi (kualitas lingkungan, penggunaan sumber daya terbarukan, biodiversitas). Temuan kritis mereka adalah bahwa kemajuan di satu dimensi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kemajuan di dimensi lain—bahkan seringkali justru berbanding terbalik, mengonfirmasi perlunya pengukuran yang serentak dan komprehensif.

Utama et al. (2020) mengadaptasi kerangka evaluatif yang serupa dalam konteks Indonesia melalui konsep *Quality Balance Development* di Bali, yang menggeser fokus dari kuantitas kunjungan ke kualitas pengalaman dan dampak positif pariwisata bagi masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan argumen Mitra dan Paul (2025) yang menekankan perlunya strategi pengembangan yang secara eksplisit mengintegrasikan pelestarian warisan budaya sebagai indikator keberhasilan, bukan hanya sebagai pertimbangan sampingan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dan analisis kasus komparatif (*comparative case study analysis*). Sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, prosiding konferensi, laporan organisasi pariwisata internasional, dan studi kasus destinasi yang terdokumentasi dengan baik. Kriteria inklusi literatur meliputi: relevansi tematik dengan keseimbangan pariwisata dan pelestarian budaya, diterbitkan dalam rentang 2015–2025, dan tersedia dalam bentuk teks lengkap yang dapat diverifikasi.

Analisis kasus komparatif dilakukan terhadap destinasi dari enam konteks geografis: Thailand, Laos, Eropa (Bordeaux dan Dubrovnik), Timur Tengah (Jeddah), Kanada (Tofino), dan Indonesia (Borobudur, Tanah Lot, Lombok, Suranadi, Palembang, dan Bali). Pemilihan kasus didasarkan pada representasi yang beragam dalam hal konteks budaya, skala destinasi, model pengelolaan, dan fase perkembangan pariwisata, sehingga temuan komparatif dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang variasi strategi keseimbangan yang diterapkan dalam kondisi yang berbeda-beda.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Keseimbangan dalam Pariwisata dan Warisan Budaya

Isu keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya telah lama menjadi perdebatan akademik dan praktis. Pada satu sisi, pariwisata dianggap sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan

masyarakat lokal. Di sisi lain, perkembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengancam keberadaan warisan budaya yang justru menjadi daya tarik utama destinasi tersebut (Sangchumnong & Kozak, 2020; Sauf, 2015).

Appendino (2017) menegaskan bahwa keseimbangan bukan berarti meniadakan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan seiring dengan upaya pelestarian. Konsep ini diperkuat oleh Zhu et al. (2022) melalui *Balanced Development Index*, yang menilai keberlanjutan desa tradisional di Zhejiang, Tiongkok, dengan menemukan bahwa keseimbangan hanya bisa dicapai jika semua dimensi pembangunan—ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi—diukur secara serentak dan ditangani dengan bobot yang proporsional.

Pistol dan Ronda (n.d.) menekankan pentingnya memahami hubungan antara tradisi dan pariwisata secara kritis. Bagi masyarakat adat di Thailand dan Australia, pariwisata menjadi ruang untuk memperkenalkan tradisi, tetapi juga menghadirkan risiko "komodifikasi budaya"—kondisi ketika nilai spiritual atau sakral dari budaya dikurangi hanya untuk kepentingan konsumsi wisatawan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi tanpa kehilangan makna otentiknya? Yang et al. (2025) mengeksplorasi pertanyaan serupa dalam konteks ekosistem fragil di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet, menemukan bahwa batas ambang (*threshold*) keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan konservasi berbeda secara signifikan bergantung pada ketangguhan ekologis dan kapasitas adaptif masing-masing komunitas.

4.2 Studi Kasus Internasional: Praktik Baik dan Tantangan

Thailand: Desa Ban Wangka Mon. Sangchumnong (2016) dan Sangchumnong dan Kozak (2020) mengkaji desa Ban Wangka Mon di Thailand yang berhasil mengembangkan model pariwisata berkelanjutan berbasis budaya. Desa ini tidak hanya menjual pertunjukan seni, tetapi juga menghadirkan pengalaman autentik seperti ritual keagamaan, kuliner tradisional, dan partisipasi dalam aktivitas masyarakat. Keberhasilan model ini bertumpu pada tiga pilar: keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama bukan sekadar objek; pembatasan jumlah wisatawan untuk mencegah tekanan sosial dan ekologis; serta diversifikasi atraksi melalui penggabungan budaya dengan ekowisata. Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko homogenisasi budaya akibat tekanan permintaan pasar dan kebutuhan untuk terus memperbarui strategi promosi tanpa mengorbankan nilai tradisional.

Laos dan Thailand: Situs Warisan Dunia. Khlaikaew (2015) meneliti pengelolaan warisan dunia di Luang Prabang, Laos, dan Sukhothai, Thailand. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi antarpemangku kepentingan sering kali berbeda secara mendasar. Pemerintah lebih fokus pada jumlah kunjungan, sementara masyarakat lokal menekankan pelestarian budaya. Perbedaan ini memicu konflik laten yang membutuhkan wadah kolaborasi terstruktur agar semua kepentingan dapat diakomodasi secara berkeadilan dan tidak mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan lainnya.

Eropa: Bordeaux dan Dubrovnik. Appendino (2017) mengangkat kasus Bordeaux, Prancis, yang sukses mengintegrasikan konservasi warisan dengan pembangunan kota modern. Kota ini tidak menolak pembangunan modern, tetapi menyesuaikan desain arsitektur baru agar harmonis dengan bangunan bersejarah yang ada, menciptakan kontinuitas estetis antara masa lalu dan masa kini. Kasus Dubrovnik yang dikaji oleh Stecker dan Hartmann (2019)

menampilkan tantangan sebaliknya: *overtourism* yang mengancam keberlanjutan destinasi warisan dunia. Solusinya, pemerintah Kroasia membatasi jumlah kapal pesiar yang berlabuh dan menerapkan kuota wisatawan harian sebagai instrumen pengendalian kapasitas. Ramazanov et al. (2024) memperkuat dimensi ini melalui kajian Porto, Portugal, yang menunjukkan bahwa wisatawan yang memahami nilai warisan cenderung lebih bertanggung jawab dalam berperilaku dan mendukung upaya konservasi secara aktif.

Timur Tengah: Jeddah, Arab Saudi. Sampieri dan Bagader (2024) menyoroti bagaimana Jeddah berusaha menyeimbangkan promosi pariwisata dengan perlindungan warisan budaya Islam. Melalui regulasi ketat dan program edukasi yang intensif, kota ini berhasil mempertahankan identitas budaya tanpa menghambat pertumbuhan pariwisata, mendemonstrasikan bahwa konteks religius dapat menjadi kerangka pelestarian yang kuat jika diintegrasikan dalam kebijakan pariwisata secara konsisten.

Kanada: Tofino dan Pendekatan Multi-Pemangku Kepentingan. Dodds (2025) mendokumentasikan keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Tofino, Kanada, selama 15 tahun yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif: pemerintah lokal, komunitas adat, sektor swasta, akademisi, dan wisatawan. Keterlibatan inklusif ini menciptakan rasa memiliki bersama yang menjadi fondasi komitmen jangka panjang terhadap keseimbangan. Dari berbagai kasus ini terlihat jelas bahwa strategi keseimbangan selalu bergantung pada konteks lokal—baik bentuk budaya, kapasitas masyarakat, maupun kebijakan pemerintah—sehingga tidak ada formula tunggal yang dapat diterapkan secara universal (Dai & Zhang, 2024).

4.3 Studi Kasus Indonesia: Desa Wisata dan Dilema Pelestarian Budaya

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, sehingga desa wisata menjadi salah satu fokus utama pembangunan pariwisata nasional. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya dilema besar yang membutuhkan strategi penanganan yang kontekstual dan adaptif.

Borobudur dan Tanah Lot. Diarta dan Ketut (2017) memperlihatkan tarik-menarik antara pelestarian budaya dengan kepentingan industri pariwisata di dua situs ikonik ini. Borobudur, di satu sisi merupakan situs spiritual dan budaya yang memiliki fungsi keagamaan aktif, namun di sisi lain menjadi destinasi internasional yang menerima jutaan wisatawan per tahun. Tegangan antara kedua fungsi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas antara aksesibilitas publik dan perlindungan sakralitas situs. Waluyo dan Guritno (2023) menegaskan bahwa harmonisasi antara dimensi ekologis, budaya, dan ekonomi di kawasan seperti Borobudur memerlukan rancangan kebijakan yang jauh lebih terintegrasi dibandingkan pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan.

Lombok: Integrasi dengan Ekonomi Kreatif. Putrajip (2025) mengkaji desa wisata di Lombok yang mencoba mengintegrasikan warisan budaya dengan ekonomi kreatif. Masyarakat tidak hanya mempertunjukkan tari tradisional, tetapi juga mengembangkan produk kerajinan yang dijual kepada wisatawan dengan narasi budaya yang autentik. Model ini dianggap sebagai solusi yang menjanjikan karena memberi manfaat ekonomi langsung tanpa harus mengorbankan otentisitas budaya—selama kontrol kualitas dan kurator budaya tetap di tangan komunitas lokal.

Suranadi Village, Bali. Bratayasa (2023) menunjukkan bagaimana Desa Suranadi menerapkan regulasi lokal berbasis adat untuk melindungi lingkungan dan budaya dari dampak pariwisata yang tidak terkontrol. Aturan adat yang terinstitusionalisasi dan peran aktif masyarakat sebagai "penjaga budaya" menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan dan perlindungan terhadap aspek-aspek sakral yang tidak untuk dipublikasikan.

Palembang: Musi Riverside. Lusetyowati (2015) menyoroti pelestarian tepian Sungai Musi yang berhasil dipadukan dengan pengembangan pariwisata. Kawasan ini mempertahankan identitas budaya melalui revitalisasi arsitektur bersejarah dan penyelenggaraan kegiatan seni yang secara aktif melibatkan komunitas lokal, menciptakan ruang publik yang berfungsi ganda sebagai atraksi wisata sekaligus ruang ekspresi budaya bagi warga.

Bali: Model Keseimbangan Kualitas. Utama et al. (2020) menawarkan konsep *Quality Balance Development* di Bali yang menekankan pengelolaan pariwisata tidak hanya berbasis kuantitas kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman dan dampak positif bagi masyarakat. Konsep ini merepresentasikan pergeseran paradigma yang penting: dari orientasi pariwisata massal yang mengejar angka, menuju pariwisata berkualitas tinggi yang mengutamakan kedalaman pengalaman budaya dan keberlanjutan jangka panjang.

Warisan Budaya Takbenda. Wasela (2023) menekankan peran warisan budaya takbenda—tari, musik, ritual, dan tradisi lisan—dalam pariwisata dan kerentanannya yang sangat tinggi terhadap komodifikasi. Warisan takbenda bersifat "hidup" dan bergantung pada praktisi yang secara aktif mempertahankan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Ketika warisan ini diubah untuk memenuhi ekspektasi wisatawan—disederhanakan, dipendekkan, atau disesuaikan dengan preferensi estetis luar—makna sakral dan fungsi sosialnya dapat terkikis secara perlahan namun pasti.

Secara umum, kasus-kasus di Indonesia memperlihatkan pola yang konsisten: desa wisata dapat menjadi instrumen pembangunan lokal yang efektif, tetapi tanpa tata kelola yang kuat dan berbasis komunitas, warisan budaya berisiko mengalami degradasi atau hilang secara permanen.

4.4 Strategi Mencapai Keseimbangan: Pendekatan Multidimensi

Dari berbagai studi yang dikaji, enam strategi utama dapat diidentifikasi sebagai landasan mencapai keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian warisan budaya di desa wisata.

Keterlibatan Komunitas (*Community-Based Tourism*). Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan sebagai subjek utama, bukan sekadar objek atau penerima manfaat pasif (Sangchumnong, 2016; Bratayasa, 2023). Keterlibatan yang bermakna mencakup hak untuk menentukan aspek budaya mana yang boleh dijadikan atraksi, kapasitas wisatawan yang dapat diterima, dan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang dirasakan adil oleh seluruh anggota komunitas.

Regulasi dan Kebijakan yang Berbasis Daya Dukung. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang melindungi budaya dari eksploitasi sekaligus menetapkan batas kapasitas daya

dukung destinasi. Kasus Dubrovnik (Stecker & Hartmann, 2019) mendemonstrasikan bahwa kuota wisatawan harian dan pembatasan kapal pesiar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan tekanan *overtourism* pada situs warisan.

Integrasi Ekonomi Kreatif. Budaya dapat dikembangkan menjadi produk kreatif tanpa kehilangan otentisitas, seperti yang diterapkan di Lombok (Putrajip, 2025). Kunci keberhasilannya terletak pada pelibatan seniman dan pengrajin lokal dalam proses produksi, penetapan standar kualitas berbasis autentisitas, dan pemberian kredit budaya yang tepat kepada komunitas sumber inspirasi.

Edukasi Wisatawan dan Interpretasi Budaya. Wisatawan perlu dididikasi mengenai makna budaya yang mereka nikmati agar terjadi apresiasi yang bermakna, bukan sekadar konsumsi dangkal (Wasela, 2023; Ramazanova et al., 2024). Interpretasi budaya yang berkualitas—melalui pemandu terlatih, pusat informasi pengunjung, dan materi edukasi yang komprehensif—dapat meningkatkan penghargaan wisatawan sekaligus mencegah perilaku yang tidak menghormati.

Pengukuran dan Pemantauan Keseimbangan. Model *Balanced Development Index* (Zhu et al., 2022) dan konsep *Quality Balance Development* (Utama et al., 2020) menawarkan kerangka evaluatif yang dapat diadaptasi untuk memantau secara berkala apakah desa wisata berkembang secara proporsional di semua dimensi keberlanjutan, bukan hanya dari indikator ekonomi semata.

Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan. Dodds (2025) menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak—pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan wisatawan—dalam tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Tanpa kolaborasi yang genuine dan berkesinambungan, keseimbangan hanya akan menjadi wacana normatif tanpa perwujudan nyata.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

Pembahasan mengenai keseimbangan pembangunan pariwisata dan pelestarian warisan budaya pada desa wisata menunjukkan bahwa isu ini bersifat kompleks, multidimensional, dan penuh dilema kontekstual. Pariwisata adalah peluang besar untuk memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing destinasi, namun pariwisata yang berkembang tanpa kendali dapat menjadi ancaman serius bagi kelestarian budaya yang menjadi modal utama (Sangchumnong & Kozak, 2020; Pistol & Ronda, n.d.).

Dari berbagai literatur yang ditinjau, keseimbangan dalam pariwisata tidak bisa dicapai melalui pendekatan tunggal. Ia membutuhkan kombinasi antara regulasi pemerintah yang tegas, keterlibatan masyarakat lokal yang genuine, pengelolaan berbasis komunitas, integrasi ekonomi kreatif, edukasi wisatawan, dan kerangka evaluasi yang terukur (Dodds, 2025; Zhu et al., 2022; Dai & Zhang, 2024). Studi-studi internasional dari Thailand, Prancis, Kroasia, Arab Saudi, dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga keseimbangan selalu ditentukan oleh tata kelola yang baik dan adaptasi terhadap konteks lokal (Sangchumnong, 2016; Appendino, 2017; Stecker & Hartmann, 2019; Sampieri & Bagader, 2024; Dodds, 2025).

Kasus di Indonesia memperlihatkan dinamika yang sama: desa wisata seperti Borobudur, Lombok, Suranadi, dan Bali memiliki potensi besar, tetapi juga menghadapi ancaman serius yang membutuhkan respons kebijakan yang kontekstual dan berbasis komunitas (Diarta & Ketut, 2017; Putrajip, 2025; Bratayasa, 2023; Utama et al., 2020).

Pelestarian budaya tidak hanya terbatas pada warisan *tangible*, tetapi juga meliputi warisan *intangible* yang justru paling rentan terhadap komodifikasi (Wasela, 2023). Keseimbangan dalam pariwisata dan budaya bukan tujuan akhir yang statis, melainkan proses dinamis yang terus berjalan seiring perubahan zaman, tren wisata, dan perkembangan teknologi—sehingga pendekatan yang fleksibel dan adaptif menjadi keniscayaan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis, lima rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Pertama, menjadikan masyarakat lokal sebagai pusat tata kelola pariwisata melalui program pemberdayaan, pelatihan, dan pendidikan yang sistematis, memastikan kapasitas komunitas meningkat secara berkelanjutan sebanding dengan pertumbuhan pariwisata (Sangchumnong & Kozak, 2020; Bratayasa, 2023). Kedua, pemerintah perlu menetapkan regulasi yang tegas berbasis daya dukung, termasuk pembatasan jumlah pengunjung di situs sensitif, standar etika dalam pertunjukan budaya, dan aturan bagi investor agar tidak mengabaikan nilai lokal (Stecker & Hartmann, 2019; Khlaikaew, 2015). Ketiga, memperluas integrasi dengan ekonomi kreatif dengan melibatkan pengrajin dan seniman lokal secara aktif dalam rantai nilai pariwisata, memastikan manfaat ekonomi mengalir ke tangan komunitas sumber budaya (Putrajip, 2025; Lusetyowati, 2015). Keempat, mengembangkan program edukasi wisatawan dan interpretasi budaya yang berkualitas sebagai komponen wajib dalam pengelolaan desa wisata, meningkatkan penghargaan wisatawan dan mencegah perilaku yang merusak warisan (Wasela, 2023; Ramazanov et al., 2024). Kelima, membangun sistem evaluasi dan pemantauan berbasis indikator keberlanjutan yang komprehensif—mengadaptasi model *Balanced Development Index* (Zhu et al., 2022) dan *Quality Balance Development* (Utama et al., 2020)—untuk memastikan pembangunan pariwisata berlangsung secara proporsional di semua dimensi.

Pada akhirnya, desa wisata hanya dapat berkembang secara berkelanjutan jika pembangunan pariwisata berjalan seiring dengan pelestarian budaya, melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan, tata kelola yang baik, serta kesadaran kolektif bahwa warisan budaya adalah identitas yang tidak ternilai harganya (Dodds, 2025; Mitra & Paul, 2025). Keseimbangan bukan berarti kompromi setengah-setengah, melainkan komitmen penuh untuk menjaga agar pariwisata dan budaya sama-sama hidup, saling menguatkan, dan memberi manfaat adil bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Daftar Pustaka

- Appendino, F. (2017, October). Balancing heritage conservation and sustainable development—The case of Bordeaux. Dalam *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 245, No. 6, hal. 062002). IOP Publishing.
- Bratayasa, I. W. (2023). Balancing sustainable tourism development with local regulation: A case study of Suranadi Village's efforts in environmental conservation and cultural preservation. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(6), 1273–1280.

Dai, R., & Zhang, Z. (2024). Cultural heritage and tourism development: Exploring strategies for the win-win scenario of heritage conservation and tourism industry. *Geographical Research Bulletin*, 3, 129–141.

Diarta, I. K. S., & Ketut, I. (2017). Between cultural preservation and tourism industry: Dialectic relations in cultural heritage tourism management in Tanah Lot and Borobudur Indonesia. *E-Journal of Tourism*, 4(2), 100–109.

Dodds, R. (2025). Balancing tourism development and sustainability: A multi-stakeholder approach in Tofino over 15 years. *Sustainability*, 17(2), 609.

Khlaikaew, K. (2015). The cultural tourism management under context of world heritage sites: Stakeholders' opinions between Luang Prabang communities, Laos and Muang-Kao communities, Sukhothai, Thailand. *Procedia Economics and Finance*, 23, 1286–1295.

Lusetyowati, T. (2015). Preservation and conservation through cultural heritage tourism. Case study: Musi Riverside Palembang. *Procedia—Social and Behavioral Sciences*, 184, 401–406.

Mitra, A., & Paul, S. (2025). Balancing mountain tourism, cultural heritage, and environmental stability: Strategies and challenges in sustainable development. Dalam *Balancing Mountain Tourism, Cultural Heritage, and Environmental Stability* (hal. 31–54). IGI Global Scientific Publishing.

Pistol, I., & Ronda, T. (n.d.). *Between tradition and tourism: Cultural heritage and preservation in the management of indigenous tourism in Thailand and Australia*.

Putrajip, M. Y. (2025). Integrating cultural heritage and creative economy for sustainable tourism development: A case study of Lombok, Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Tourism Sciences*, 1(1), 30–38.

Ramazanov, M., Silva, F. M., & Vaz de Freitas, I. (2024). Tourists' views on sustainable heritage management in Porto, Portugal: Balancing heritage preservation and tourism. *Heritage*, 8(1), 10.

Sampieri, S., & Bagader, M. (2024). Sustainable tourism development in Jeddah: Protecting cultural heritage while promoting travel destination. *Sustainability*, 16(21), 9148.

Sangchumnong, A. (2016). *Developing a sustainable tourism model for cultural heritage destinations: The case study of Ban Wangka Mon Village, Thailand* [Disertasi]. Bournemouth University.

Sangchumnong, A., & Kozak, M. (2020). Sustainable cultural heritage tourism at Ban Wangka Village, Thailand. Dalam *Culture and Cultures in Tourism* (hal. 25–35). Routledge.

Sauf, A. (2015). Balancing development and sustainability in tourism destinations. *Tourism Geographies*, 17(1).

Stecker, B., & Hartmann, R. (2019). Case study: Balancing the sustainability of tourism in city destinations—The case of Dubrovnik. Dalam *Corporate Sustainability and Responsibility in Tourism: A Transformative Concept* (hal. 373–382). Springer International Publishing.

Utama, I. G. B. R., Rai, G. B., Turker, S. B., Widyastuti, N. K., Suyasa, N. L. C. P. S., & Waruwu, D. (2020). Model of quality balance development of Bali tourism destination. *Technium Social Science Journal*, 10, 455.

Waluyo, E. B., & Guritno, B. (2023, December). Harmonizing ecotourism in Indonesia: Balancing the green economy, cultural heritage, and biodiversity. Dalam *International Conference on Digital Advanced Tourism Management and Technology* (Vol. 1, No. 1, hal. 376–399).

Wasela, K. (2023). The role of intangible cultural heritage in the development of cultural tourism. *International Journal of Eco-Cultural Tourism, Hospitality Planning and Development*, 6(2), 15–28.

Yang, B., Wu, J., Miao, A., Ran, J., & Jia, R. (2025). Balancing tourism development and habitat conservation in fragile ecosystems: A case study of the Qinghai-Tibet Plateau. *PLOS ONE*, 20(7), e0327803.

Zhu, X. G., Li, T., & Feng, T. T. (2022). On the synergy in the sustainable development of cultural landscape in traditional villages under the measure of balanced development index: Case study of the Zhejiang Province. *Sustainability*, 14(18), 11367.